

**ANALISIS PEMETAAN POTENSI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
TANAH DATAR**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

RAAZKYA AZMI

BP/NIM : 2015/15133061

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2018

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PEMETAAN POTENSI PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN TANAH DATAR

Nama : Raazkya Azmi
NIM : 15133061
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2018

Diketahui Oleh :

Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi


Halkadri Fitra SE, MM, Ak.
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing


Halkadri Fitra SE, MM, Ak.
NIP. 19800809 201012 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PEMETAAN POTENSI PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

Nama : Raazkya Azmi
NIM : 15133061
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Juli 2018

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

Halkadri Fitra SE, MM, Ak.

(Ketua)



Vanica Serly, SE, M.Si.

(Anggota)



Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si.

(Anggota)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: : RAAZKYA AZMI
Tahun Masuk/NIM : 2015-15133061
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 25 Oktober 1996
Program Studi : D-III Akuntansi
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Koto Lalang RT 01/RW 01, Padang
Judul Tugas Akhir : Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah Di
Kabupaten Tanah Datar
Nomor HP : 0823 8143 6732

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2018



RAAZKYA AZMI
NIM. 15133061

ABSTRAK

Raazkya Azmi (2015/15133061) Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah Di Kabupaten Tanah Datar. *Tugas Akhir*, Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2018.

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, AK, CA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan potensi pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan kategori prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif menggunakan analisis Tipologi Klassen. Penelitian dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah, yang beralamat di Jalan Sultan Alam Bagarsyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesembilan sumber pendapatan pajak daerah tidak ada yang termasuk dalam Kategori Prima, karena dari kesembilan sumber tersebut tidak ada yang memiliki potensi pendapatan dan kemampuan pengelolaan potensi yang tinggi. Kategori Berkembang adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Kategori Potensial adalah pajak restoran dan pajak penerangan jalan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Kategori Terbelakang adalah pajak hotel, pajak air mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak BPHTB, dimana keempat sumber pendapatan tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

Kata Kunci: *Potensi, Pajak Daerah*

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar”**.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada

1. Bapak Drs. Idris M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNP.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, AK, CA, sebagai Ketua Program Studi DIII FE UNP sekaligus pembimbing tugas akhir penulis.
3. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahan.
4. Seluruh karyawan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan penulis waktu dan kesediaannya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Teristimewa penulis ucapkan kepada orang tua tercinta, ayahanda Asril dan ibunda Yartimi beserta saudara-saudari tersayang atas segala pengorbanannya yang telah memberikan kesungguhan Do'a bantuan moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Terkhusus kepada saudari tersayang Irma Jayanti Mala AMd atas segala pengorbanannya yang telah memberikan kesungguhan Do'a bantuan moril maupun materil serta masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Sahabat tercinta Kurniawati Putri yang telah memberi masukan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman terbaik Heriani, Hani Mutia, Silvina Basri yang telah memberikan masukan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa program studi DIII FE UNP khususnya DIII Akuntansi angkatan 2015.
10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Dengan keterbatasan pengalam dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian tugas akhir dimasa mendatang.

Padang, Juli 2018

Raazkya Azmi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pendapatan Daerah.....	12
B. Pendapatan Asli Daerah	13
C. Pajak.....	15
D. Pajak Daerah	16
1. Pengertian Pajak Daerah	16
2. Prinsip Pajak Daerah	17
3. Pajak Daerah Menurut Lembaga Pemungutnya	19
4. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	20
E. Potensi Pajak Daerah.....	32
F. Pemetaan Potensi Pendapatan	35
1. Analisis Tipologi Klassen	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Rancangan Penelitian	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kabupaten Tanah Datar	44
B. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.....	45
C. Pembahasan.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 - 2017.....	4
Gambar 4.1	Struktur Badan Keuangan Daerah.....	48
Gambar 4.2	Persentase Kategori Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.....	6
Tabel 1.2	Perbandingan Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Tahun sampai dengan Tahun 2017.....	8
Tabel 2.1	Peta Potensi Pajak Daerah.....	33
Tabel 2.2	Kategori Sektor Berdasarkan Tipologi Klassen.....	37
Tabel 2.3	Kombinasi Matriks BCG dengan Tipologi Klassen.....	38
Tabel 2.4	Penggunaan Tipologi Klassen.....	39
Tabel 4.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.....	53
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Pemetaan Potensi Pajak Hotel Tahun 2013 s/d 2017.....	56
Tabel 4.3	Pemetaan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Tanah Datar	56
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan Pemetaan Potensi Pajak Restoran Tahun 2013 s/d 2017.....	58
Tabel 4.5	Pemetaan Potensi Pajak Restoran Kabupaten Tanah Datar	59
Tabel 4.6	Hasil Perhitungan Pemetaan Potensi Pajak Hiburan Tahun 2013 s/d 2017.....	61
Tabel 4.7	Pemetaan Potensi Pajak Hiburan Kabupaten Tanah Datar	61
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan Pemetaan Potensi Pajak Reklame Tahun 2013 s/d 2017.....	63
Tabel 4.9	Pemetaan Potensi Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar	64
Tabel 4.10	Hasil Perhitungan Pemetaan Potensi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2013 s/d 2017	66
Tabel 4.11	Pemetaan Potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Tanah Datar	66
Tabel 4.12	Hasil Perhitungan Pemetaan Potensi Pajak Air Tanah Tahun 2013 s/d 2017	68
Tabel 4.13	Pemetaan Potensi Pajak Air Tanah Kabupaten Tanah Datar	69
Tabel 4.14	Hasil Perhitungan Pemetaan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2013 s/d 2017.....	71
Tabel 4.15	Pemetaan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tanah Datar.....	71

Tabel 4.16	Hasil Perhitungan Pemetaan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 s/d 2017	73
Tabel 4.17	Pemetaan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tanah Datar	74
Tabel 4.18	Hasil Perhitungan Pemetaan Potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2013 s/d 2017	76
Tabel 4.19	Pemetaan Potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Tanah Datar.....	76
Tabel 4.20	Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar beserta Kategori yang Diperoleh Berdasarkan Hasil Pemetaan.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data PAD Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Tanah Datar

Lampiran 2 : Surat Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 3 : Surat Penerbitan Surat Izin/Rekomendasi Pengambilan Data

Lampiran 4 : Surat Observasi

Lampiran 5 : Surat Balasan Observasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan fungsi pemerintah yang lebih luas oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Didasari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi, namun tidak tertutup kemungkinan beberapa daerah menghadapi kesulitan menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kreatifitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. (Junaidi, 2013, hal 81)

Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan rumah tangganya, hal ini sejalan dengan pendapat Pamudji yang menyatakan: pemerintah daerah tak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya. Pendapat tersebut didukung juga oleh D.J Mamesah: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum memiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Elita Dewi, 2002, hal 1)

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah dalam mengoptimalkan keuangan daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik, mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraannya (Adi, 2007). Oleh sebab itu untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor-sektor potensial dalam pembangunan daerah, terutama dalam upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD pada APBD, menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD. (Rudianto, 1997 ; A Halim, 2001 dalam Junaidi 2013)

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 79 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

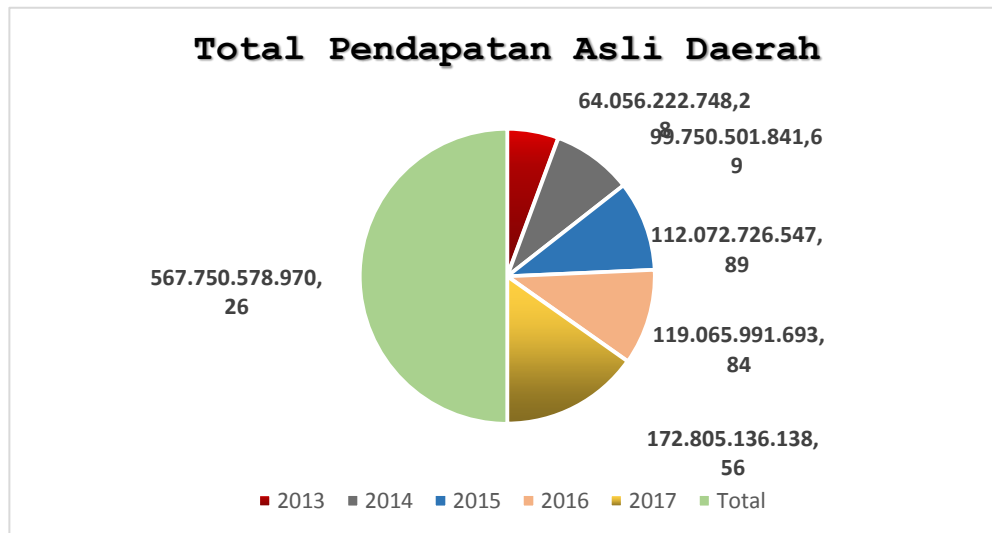
1. Pendapatan asli daerah yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah

- b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan miliki daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Dana perimbangan
 3. Pinjaman daerah
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, dengan ibu kota Batusangkar. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih dari 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun perternakan. Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Pada tahun 2013 Kabupaten Tanah Datar memperoleh peringkat terbaik 1 Sumbar dalam hal Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2009. Oleh karena itu,

tentunya potensial terhadap peningkatan keberhasilan daerah sangat tinggi dan memiliki dampak positif terhadap kemajuan daerah. Kemajuan daerah tersebut salah satunya tercermin pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. (Lihat Gambar 1.1)



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 - 2017

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa total Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Tanah Datar sudah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada. Terlihat dari Realisasi penerimaan tahun 2013 bahwa Kabupaten Tanah Datar menerima total realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 64.056.222.748,28 dan terus meningkat setiap tahunnya. Realisasi penerimaan tahun 2014 sebesar 99.750.501.841,69, di tahun 2015 realisasi penerimaan sebesar 112.072.726.547,89, dan pada tahun 2016 realisasi penerimaan sebesar 119.065.991.693,84 serta sampai dengan tahun 2017 realisasi penerimaan total Pendapatan Asli Daerah

sebesar 172.805.136.138,56. Sehingga total keseluruhan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 567.750.578.970,26.

Hal ini menunjukkan progres yang sudah dilakukan pemerintah daerah di Kabupaten Tanah Datar yang sudah mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Setiap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah memiliki realisasi penerimaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan seberapa besar kontribusi yang diberikan masing-masing komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang salah satunya adalah pajak daerah. Kabupaten Tanah Datar memiliki sembilan jenis sumber pajak daerah, diantaranya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berikut Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013
sampai dengan tahun 2017

No	Jenis Pajak Daerah	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pajak Hotel	103.779.249	83.676.684	140.173.575	125.327.667	144.140.955
2	Pajak Restoran	1.400.363.575	1.036.362.625	1.358.442.902	1.712.568.862	1.893.073.221
3	Pajak Hiburan	1.721.100	9.146.200	5.800.000	9.943.500	300.000
4	Pajak Reklame	88.035.104	123.563.728	130.227.364	164.182.294	144.602.906
5	Pajak Penerangan Jalan	5.209.511.137	5.925.985.241	6.403.664.512	6.710.326.411	9.605.990.317
6	Pajak Air Tanah	165.333.994	132.721.232	149.916.260	148.669.666	61.387.060
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	460.402.150,93	595.657.565	618.728.576	805.988.113	894.640.169,98
8	Pajak Bumi dan Bangunan	760.409.860	1.240.733.173	1.224.702.027	1.216.515.563	1.897.680.879
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	504.253.250	310.389.600	851.793.543	877.550.300	1.881.578.850
Jumlah		8.693.809.419,93	9.458.236.048	10.883.448.759	11.771.072.376	16.523.394.357,98
Rata-rata		965.978.824	1.050.915.116	1.209.272.084	1.307.896.931	1.835.932.706

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab.Tanah Datar 2018, (Data diolah)

Dari data (tabel 1.1) dapat diketahui realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar secara garis besar mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Namun beberapa pendapatan sektor pajak ada yang mengalami penurunan, yaitu pajak hotel mengalami penurunan di tahun 2014 dan kembali naik di tahun 2015. Penurunan pajak restoran juga mengalami penurunan tahun 2014 dan kembali naik pada tahun 2015. Penurunan sektor pajak juga terjadi pada pajak hiburan yaitu pada tahun 2015 dan kembali naik pada tahun 2016 dan turun kembali pada tahun 2017.

Penurunan juga terjadi pada pajak air tanah yang mengalami penurunan tahun 2014 dan kembali naik tahun 2015 dan mengalami penurunan kembali tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Pada sektor pajak bumi dan bangunan juga mengalami penurunan tahun 2015 sampai dengan 2016 dan kembali naik pada tahun 2017. Penurunan juga terjadi pada sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang turun pada tahun 2014 dan kembali naik pada tahun berikutnya. Dan pada sektor pajak lain mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Di dalam Pendapatan Asli Daerah terdapat komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang juga memberikan kontribusinya dalam total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017

Tahun	PAD	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Lain-lain PAD yang Sah	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
2013	64.056.222.748,28	8.693.809.419,93	13,57%	6.431.353.888,28	10,04%	23.528.134.407,00	36,73%	25.402.925.033,07	39,66%
2014	99.750.501.841,69	9.458.236.048,00	9,48%	11.639.779.994,00	11,67%	23.417.150.835,00	23,48%	55.235.334.964,69	55,37%
2015	112.072.726.547,89	10.883.448.759,00	9,71%	8.578.762.642,00	7,65%	21.311.850.250,00	19,02%	71.298.664.896,89	63,62%
2016	119.065.991.693,84	11.771.072.376,00	9,89%	8.035.472.905,00	6,75%	22.072.440.727,00	18,54%	77.187.005.685,84	64,83%
2017	172.805.136.138,56	16.523.394.357,98	9,56%	6.867.932.810,00	3,97%	23.511.196.941,00	13,61%	125.902.612.029,58	72,86%
Rata-rata	567.750.578.970,26	57.329.960.960,91	10,44%	41.553.302.239,28	8,02%	113.840.773.160,00	22,27%	355.026.542.610,07	59,27%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar , Data diolah 2018

Dari Komponen PAD yang tertera pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa PAD Kabupaten Tanah Datar lebih banyak didominasi oleh Lain-lain PAD yang Sah dengan perbandingan rata-rata kontribusi 59,27% dari komponen PAD lainnya. Hal ini menunjukkan komponen Lain-lain PAD yang Sah merupakan penyumbang terbesar bagi keseluruhan total Pendapatan Asli Daerah. Namun bukan berarti komponen PAD yang lain tidak berpengaruh, untuk meningkatkan nilai kontribusi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar harus menggali potensi-potensi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang baru dalam memaksimalkan perolehan dari sumber-sumber pajak yang sudah ada. Di Kabupaten Tanah Datar, potensi penerimaan retribusi daerah masih belum tergali secara optimal atau masih lebih rendah dibandingkan dengan komponen PAD yang lain, hal ini terlihat dari persentase retribusi yang hanya 8,02% dari total keseluruhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Begitu pun dengan pajak daerah yang masih tergolong rendah dari komponen pajak daerah lainnya.

Secara umum, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, (Mahmudi, 2009:21). Hal ini menjadi perhatian penting karena berdasarkan perhitungan kontribusi di atas pajak daerah masih tergolong rendah. Sehingga pemerintah daerah harus lebih dalam menggali potensi pajak daerah yang ada, sebagai upaya dalam meningkatkan pajak daerah. Dalam mewujudkan upaya tersebut secara maksimal, Kabupaten Tanah Datar dihadapkan dengan pengeluaran dana yang tidak sedikit, sedangkan dana dari

Pemerintah Pusat terbatas. Untuk itu salah satu upaya untuk mewujudkan dana yang memadai maka perlu dilakukan pemetaan. Salah satunya dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen yang nanti diperoleh empat kategori pemetaan yaitu: kategori prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Sehingga diketahui potensi-potensi pajak daerah yang masih belum optimal maupun yang sudah maksimal di Kabupaten Tanah Datar, serta diperolehnya kebijakan untuk meningkatkan pajak daerah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah “Bagaimana pemetaan potensi Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2013-2017 ”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah “Untuk mengetahui pemetaan potensi Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2013-2017 ”

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi mafaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Pajak Daerah.

b. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan bahan masukan untuk bahan pertimbangan terhadap kinerja dalam mengatur penerimaan pajak daerah.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai pemetaan potensi pajak daerah, sehingga hal tersebut dapat dipengaruhi sebagai referensi untuk penelitiannya yang berkaitan dengan judul dari tugas akhir ini.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan tentang Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa kesembilan sumber pendapatan pajak daerah tidak ada yang termasuk dalam Kategori Prima, karena dari kesembilan sumber tersebut tidak ada yang memiliki potensi pendapatan dan kemampuan pengelolaan potensi yang tinggi. Kategori Berkembang adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Kategori Potensial adalah pajak restoran dan pajak penerangan jalan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Kategori Terbelakang adalah pajak hotel, pajak air mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak BPHTB, dimana keempat sumber pendapatan tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, berikut disampaikan saran sebagai solusi yang diharapkan dapat memberikan manfaat ke Kabupaten Tanah Datar yaitu sebagai berikut:

1. Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar, diharapkan pemerintah dapat tanggap dalam memaksimalkan setiap peluang yang ada khususnya dalam penerimaan pajak daerah sehingga dapat membantu dalam pembangunan daerah.

2. Pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan strategi pemungutan intensifikasi dan ekstensifikasi agar hasil yang di peroleh dari pemungutan pajak dapat dilakukan secara optimal.
3. Adanya evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah yang dalam pelaksanaannya sehingga diperoleh kelemahan dan kekurangan yang terjadi dan menjadi tolak ukur untuk pelaksaan selanjutnya, yang mana salah satunya dapat dilakukan dengan pemetaan potensi pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Hasan et.al. 2013. *Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+pe+metaan+potensi+pajak+daerah&oq=analisis#d=gs_qbs&p=&u=%23p%3D2jYewp08BRgJ di unduh pada tanggal 6 april 2018 pukul 20.21 WIB
- Dewi, Elita. 2002. *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
<http://library.usu.ac.id/download/fe/manajemen-elita.pdf>, di unduh pada tanggal 6 april pukul 23.15 WIB
- Halkadri, Fitra dan Fefri Indra Arza. 2017. *Analisis Kontribusi dan Pemetaan Pajak Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dengan Menggunakan Tipologi Klassen*. Padang: FKBI
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Menteri Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Menteri Dalam Negeri
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Andi YOGYAKARTA
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan* . Yogyakarta: Salemba Empat
- Santoso, Purbayu Budi dan Rahayu, Retno Puji. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*.
<http://eprints.undip.ac.id/16857/> di unduh pada tanggal 6 april 2018 pukul 20.00 WIB
- Setiadji, Wirawan dan Adi, Priyo Hari. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalam Pergeseran* .
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+pe+metaan+potensi+pajak+daerah&oq=analisis#d=gs_qabs&p=&u=%23p%3DNp8nCeBTBcJ, di unduh pada tanggal 6 april 2018 pukul 22.35 WIB